

## Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penanggulangan Kemiskinan

**Yusnike Yusnike**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [jupitanatalia641@gmail.com](mailto:jupitanatalia641@gmail.com)

**Jupita Natalia**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [Yusnike13@gmail.com](mailto:Yusnike13@gmail.com)

Korespondensi Penulis: [jupitanatalia641@gmail.com](mailto:jupitanatalia641@gmail.com)

**Abstract.** *The Tanjung Pinang City Government has a crucial role in alleviating poverty in its area. This research aims to evaluate the role and steps taken by the local government in an effort to reduce the level of poverty in the city. This study includes an analysis of the policies implemented by the Tanjung Pinang City Government in dealing with poverty problems. The main focus is on social programs, economic initiatives, education, health, and infrastructure development designed to reduce poverty levels in various levels of society. The research methods used include surveys, secondary data analysis, and interviews with relevant stakeholders, including non-governmental organizations, academics, and local government. The collected data is then analyzed to evaluate the effectiveness of the programs that have been implemented and to identify challenges and potential solutions in reducing poverty in Tanjung Pinang.*

*The research results highlight various steps that have been taken by the Tanjung Pinang City Government in an effort to reduce poverty, such as social assistance programs, skills training, access to health and education services, and infrastructure development. However, several obstacles were also identified, such as budget limitations, coordination between institutions, and complex socio-economic challenges that hampered the effectiveness of these programs. This research provides an overview of the role played by the Tanjung Pinang City Government in alleviating poverty. Recommendations are provided for improving and improving strategies, cross-sector collaboration, and increasing resource allocation to increase the effectiveness of poverty reduction efforts in the region.*

**Keywords:** *Poverty, Alleviation, Tanjungpinang*

**Abstrak.** Pemerintah Kota Tanjung Pinang memiliki peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di kota tersebut. Studi ini mencakup analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menangani masalah kemiskinan. Fokus utamanya adalah pada program-program sosial, inisiatif ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei, analisis data sekunder, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pihak pemerintahan setempat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan serta untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Tanjung Pinang.

Hasil penelitian menyoroti berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam upaya mengurangi kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Namun, juga teridentifikasi beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta tantangan sosial-ekonomi yang kompleks yang menjadi penghambat efektivitas program-program tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi diberikan untuk perbaikan dan peningkatan strategi, kerjasama lintas sektor, serta peningkatan alokasi sumber daya guna meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Penanggulangan, Tanjungpinang

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang senantiasa dihadapi oleh setiap wilayah dunia dan terkhusus masyarakat pendaerahan yang tertinggal yang menyebabkan angka kemiskinan berambah. Masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi, dimana kemiskinan sudah menjadi bagian yang tiada terpisahkan bagi kehidupan manusia. Kemiskinan bukan hanya sekedar permasalahan ekonomi melainkan berkaitan dengan kondisi permasalahan social dan lingkungan.

Permasalahan sosial lain dalam masyarakat, seperti kebodohan akibat kurangnya akses pendidikan, pengangguran, bertambahnya jumlah anak jalanan dan pengemis, serta meningkatnya kriminalitas, semuanya disebabkan oleh kemiskinan. Jadi kemiskinan juga diakui sebagai sumber segala kejahatan. Karena mendesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan kelangkaan lapangan kerja, orang miskin terkadang melakukan perilaku ilegal untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk pencurian, perampokan, perdagangan narkoba, dan pembunuhan.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, dan menjadi komitmen bersama nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, lintas negara, sektoral, lintas pelaku, terpadu, dan berkelanjutan. Negara Indonesia telah dua kali dikenal atas upayanya untuk mengurangi kemiskinan. Pertama, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia menurun dari sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996, yang mendapat pujian dari Bank Dunia pada masa Orde Baru atas keberhasilannya. Kedua, dari tahun 2005 hingga 2009.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penurunan kemiskinan tercepat, menurut data dari World Factbook dan Bank Dunia. Pada Maret 2012, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan turun dari 35,1 juta pada tahun 2005 menjadi 29 juta. Ini membuktikan telah menjadi pengurangan jumlah 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan gagasan mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*), dimana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dari perspektif ekonomi sampingan bukan dari perspektif pengeluaran yang dibayangkan dengan Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan gambaran minimalnya rupiah yang dibutuhkan untuk membeli kebutuhan pokok selain makanan, yaitu sebesar 2100 kilokalori per orang per hari.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang mencakup 52 komoditas berbeda dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang mencakup 51 komoditas berbeda di perkotaan dan 47 komoditas berbeda di pedesaan adalah dua komponen Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS. GK merupakan produk dari GKM dan GKNM. Yang dimaksud dengan “miskin” adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang terakhir rilis dari BPS masih sampai dengan tahun 2021 mencapai sebesar Rp719.776,-/kapita/bulan, meningkat dari tahun 2020 yang tercatat Rp691.738,-/kapita/bulan. Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang setiap tahun selalu tercatat lebih tinggi jika 60 Analisis Statistik Sektoral 2021 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat sebesar Rp642.425,-/kapita/bulan. Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang antara tahun 2016 dan 2019 menurun dari 9,34% pada tahun 2016 menjadi 9,03% pada tahun 2019.

Namun persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang meningkat pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing naik menjadi 9,37 persen pada tahun 2020 dan 9,57 persen pada tahun 2021. Secara alami, keberadaan kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari adanya pdemic 19, dimana kegiatan ekonomi penduduk sangat terdampak dan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat. Secara riil, penduduk miskin Kota Tanjungpinang sebanyak 19,98 ribu pada tahun 2020, meningkat 930 orang dibanding tahun 2019.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 akan bertambah sebanyak 870 orang sehingga total menjadi 20,85 ribu. Mengingat dampak pandemi Covid-19, perlu dilakukan upaya serius untuk menghentikan penyebarannya. Hal ini juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena menggambarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan, maka angka kemiskinan menjadi topik yang sangat sensitif. Akibatnya, selain isu-isu sosial lainnya, pembahasan sosial selalu menggunakan data kemiskinan sebagai indikator utama analisis, khususnya bagi pembuat kebijakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dokumen resmi atau laporan dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang mencakup program-program atau kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Studi-studi atau penelitian yang dilakukan oleh lembaga akademis, LSM, atau pihak independen yang membahas efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Tanjung Pinang. Referensi dari organisasi seperti Bank Dunia, PBB, atau lembaga internasional lainnya

yang dapat memberikan perspektif global atau nasional tentang penanggulangan kemiskinan dan memberikan contoh atau analisis terkait Tanjung Pinang. Rencana aksi nasional atau kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pengentasan kemiskinan yang mencakup konteks atau arahan yang dapat diterapkan di tingkat lokal, termasuk Tanjung Pinang.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Fokus pada kebijakan atau program spesifik yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa program tertentu yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meninjau efektivitas berbagai program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ini meliputi program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi. Saya tidak memiliki data langsung mengenai evaluasi program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Pinang. Mengevaluasi data terkait tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi program. Apakah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kesejahteraan.

Mengukur sejauh mana program-program tersebut mencapai sasaran. Apakah program-program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak yang signifikan. Menilai sejauh mana program-program pemerintah terintegrasi satu sama lain. Apakah ada sinergi antara program-program kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial untuk memberikan solusi holistik dalam mengatasi kemiskinan. Evaluasi apakah program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di Tanjung Pinang. Apakah program-program tersebut mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan spesifik dari komunitas yang dituju. Mengevaluasi alokasi anggaran dan manajemen keuangan terkait program-program penanggulangan kemiskinan. Apakah dana yang digunakan sesuai dengan tujuan program dan terdistribusi secara adil.

Mengukur hasil atau outcome dari dana yang diinvestasikan dalam program-program tersebut. Apakah dana tersebut menghasilkan perubahan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan,

implementasi, dan evaluasi program-program tersebut. Apakah ada mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan. Evaluasi kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. Mengevaluasi keberlanjutan program-program tersebut dalam jangka panjang. Apakah program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Evaluasi program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan obyektif, mengacu pada data yang valid dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi dan manfaat dari program tersebut.

Efektivitas Kebijakan dan Program: Mendiskusikan keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program tersebut. Apakah ada hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan Stakeholderi ialah membahas peran serta dan kontribusi berbagai pihak termasuk masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Tanjung Pinang. Kesenambungan dan Rekomendasi ialah menyoroti pentingnya kesinambungan program-program yang berhasil, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perluasan program yang berpotensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.

Penting untuk merangkum hasil penelitian secara obyektif dan memberikan gambaran yang akurat tentang peran Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi dan temuan yang relevan juga perlu dipertimbangkan dalam konteks perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi yang diharapkan dari program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Pinang, Jika terdapat penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan, ini bisa dianggap sebagai indikator keberhasilan program-program yang telah diterapkan. Jika program-program tersebut berhasil memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat yang terpinggirkan, hal ini menunjukkan efektivitas program dalam meratakan kesenjangan sosial. Mengidentifikasi hambatan utama yang mungkin menghalangi efektivitas program. Hal ini bisa mencakup keterbatasan anggaran,

kurangnya koordinasi antar lembaga, atau ketidakmampuan program untuk mencakup seluruh spektrum kebutuhan masyarakat. Memberikan saran konkret untuk perbaikan program-program yang ada. Hal ini bisa termasuk penyesuaian dalam perencanaan, alokasi anggaran yang lebih efisien, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, dan fokus pada solusi jangka panjang.

Menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program. Hal ini memastikan program-program tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, LSM, dan kelompok masyarakat dalam upaya bersama mengurangi tingkat kemiskinan. Kesimpulan harus bersifat holistik, mempertimbangkan baik capaian positif maupun tantangan yang dihadapi. Sebuah kesimpulan yang seimbang akan memberikan arahan yang jelas untuk langkah-langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanjung Pinang.

## DAFTAR PUSTAKA

M. ZUHDY SYAFARA, S. (2023). FOKUS ATASI KEMISKINAN, P WAKO INSTRUKSIKAN OPD JALANKAN PROGRAM TEPAT SASARAN. Tanjungpinang : <https://www.tanjungpinangkota.go.id/>.

Pasaribu, Y. (2016). "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)". SKRIPSI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pimpinan, P. d. (2023). Hasan Akan Susun Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui DID. Tanjungpinang : <https://humprofoto.tanjungpinangkota.go.id/>.